

Jurnal Studi Ilmu Politik, di Publish oleh Program Studi Ilmu Politik
FISIP UIN Raden Fatah Palembang

Sarkasme Politik dalam Perspektif Hak Asasi Manusia

Aly Ubaid Arafi'i¹, Kun Budianto², Siti Anisyah³

^{1,2,3}Ilmu Politik, FISIP, Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang

Email : alyubaidarafii@gmail.com

ABSTRACT

This research is entitled Political Sarcasm Against President Joko Widodo Period 2019 – 2024 on Twitter in a Human Rights Perspective. Freedom of expression is placed as a form of freedom in seeking information and then discussing whether to support or criticize it as a process to remove our misconceptions about facts and values. The use of sarcasm is considered as one of freedom of expression. In fact, the use of sarcasm on Twitter in criticizing Joko Widodo's government resulted in intervention and even imprisonment. This study aims to find out how political sarcasm is used against President Joko Widodo for the 2019 – 2024 period on Twitter from a human rights perspective. The theory used is the theory of freedom of expression according to Joel Feinberg which in his view states that there are limits to freedom of expression. The use of sarcasm was in an effort to criticize President Joko Widodo. There are sarcasm that are harsh and unpleasant to hear so that there are expressions of sarcasm on Twitter which end up in court because the tweets cause insults to individuals and religious groups. The use of sarcasm can be trapped by violations of the Articles of the ITE Law and can go beyond the limits of freedom of expression according to Joel Feinberg.

Keywords: *Political Sarcasm, Political Sarcasm, President Joko Widodo, Human Rights, Freedom of Expression.*

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul Sarkasme Politik Terhadap Presiden Joko Widodo Periode 2019–2024 di Twitter dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. Kebebasan berekspresi ditempatkan sebagai bentuk kebebasan dalam mencari informasi serta kemudian memperbincangkannya apakah mendukung atau mengkritiknya sebagai sebuah proses untuk menghapus miskonsepsi kita atas fakta dan nilai. Penggunaan sarkasme dinilai sebagai salah satu kebebasan berekspresi. Pada kenyataannya penggunaan sarkasme di Twitter dalam mengkritik Pemerintah Joko Widodo berujung intervensi bahkan dibui. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penggunaan Sarkasme Politik Terhadap Presiden Joko Widodo Periode 2019 – 2024 di Twitter dalam perspektif Hak Asasi Manusia. Teori yang pakai ialah teori kebebasan berekspresi menurut Joel Feinberg yang dalam pandangannya menyatakan bahwa terdapat batasan dalam

kebebasan berekspresi. Penggunaan sarkasme tersebut dalam upaya mengkritik Presiden Joko Widodo. Terdapat sindiran-sindiran yang kasar dan kurang enak di dengar sehingga ada ungkapan sarkasme di twitter yang berujung di pengadilan sebab tweet tersebut menyebabkan penghinaan terhadap individu dan golongan agama. Penggunaan sarkasme dapat terjebak dengan pelanggaran pasal UU ITE dan dapat keluar batas kebebasan berekspresi menurut Joel Feinberg.

Kata Kunci : Sarkasme Politik, Presiden Joko Widodo, Hak Asasi Manusia, Kebebasan Berekspresi.

PENDAHULUAN

Setiap manusia mempunyai hak dasar yaitu hak asasi manusia yang dimiliki sejak manusia itu lahir (Hidayati, Sutikno & Erawanto, 2022; Waty, Mirza & Fadli, 2022). Hak Asasi Manusia merupakan anugerah yang dimiliki oleh setiap manusia yang tidak dapat diganggu gugat serta tidak dapat dicabut hak-hak tersebut. Kepemilikan HAM yang melekat pada diri seseorang berlaku kapanpun, dimanapun serta kepada siapapun (Budianto, 2019). Negara dalam hal ini mengenai hak asasi manusia mempunyai kewajiban untuk melindungi, menghormati dan memenuhi hak asasi manusia, termasuk mencegah dan menindaklanjuti pelanggaran-pelanggaran yang terjadi (Anisyah, 2022; Harahap & Anisyah, 2021).

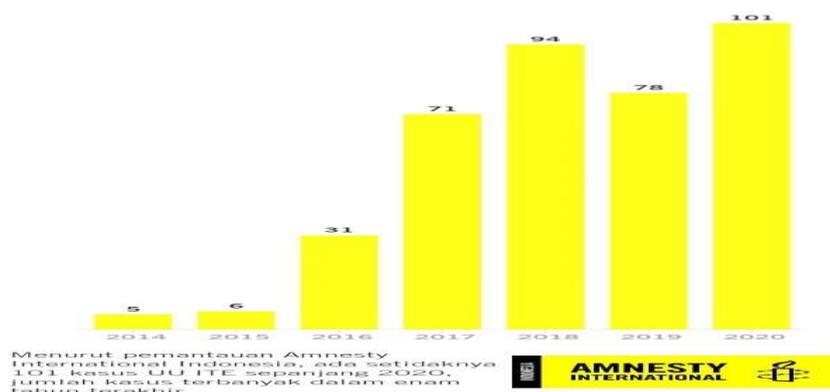
Menurut muhammad Asri (2018 : 2), HAM merupakan hak-hak yang melekat pada diri manusia karena hakikat dan kodrat kelahirannya sebagai manusia (Ardiyansyah & Maielayuskha, 2022; Mayori, 2021; Nabilah Izomiddin & Harahap, 2022). Ham diakui secara universal karena hak-hak ini merupakan bagian dari eksistensi kemanusiaan setiap orang, tanpa membedakan warna kulit, jenis kelamin, usia, etnis, dan budaya, agama atau keyakinan spiritualitasnya (Fadli et al., 2022; Hidayaturrahman et al., 2022; Sholihin et al., 2022). Hak tersebut melekat pada kodrat kelahirannya sebagai manusia dan bukan berasal dari pemberian suatu organisasi kekuasaan manapun (Harahap et al., 2021).

Mengenai hak asasi, negara mempunyai kewajiban mencegah serta melindungi dari pada perampasan dan pelanggaran hak yang bersifat asasi bagi setiap diri manusia (Saraswati & Rijal, 2022; Singgalen et al., 2022). Hak asasi juga dipergunakan sebagai wujud untuk memperjuangkan penghapusan segala bentuk penjajahan dan penindasan terhadap sebuah bangsa (Baidlowi & Pradana, 2022; Harahap, Zalpa & Yumitro, 2021). Bentuk hak asasi manusia yang seringkali dirasa terampas adalah hak politik sebagai warga negara dan hak kebebasan berpendapat (Marthen, Harahap & Yulion, 2022).

Hak politik merupakan hak asasi generasi pertama yang sudah lama dikenal dan diakui atas hak kebebasan, atas kesamaan (equality) dan hak menyatakan pendapat (Miriam Budiarmo, 2015 : 214-217). Di dalam negara hukum, hak politik dijamin dalam konstitusi negara sebagai bentuk perwujudan, pelaksanaan nilai-nilai demokrasi dan penghormatan serta perlindungan hak asasi manusia (Waty, Mirza & Fadli, 2022).

Pada hak politik bagi setiap warga negara terdapat salah satu hak yang harus diakui oleh negara yakni hak kebebasan berekspresi. Hak kebebasan berekspresi ialah hak bagi setiap warga negara untuk menyampaikan aspirasi, gagasan atau pikiran baik itu dengan cara tulisan, lisan atau bentuk lainnya serta dapat dipertanggung jawabkan tanpa adanya tekanan dari siapapun, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Seperti yang dijelaskan Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 sebelumnya, Hak kebebasan berpendapat dilindungi asalkan tidak mengganggu Hak Asasi Manusia orang lain.

Menurut data Amnesty Internasional Indonesia sepanjang periode pertama Presiden Joko Widodo – Jusuf Kalla (2014-2019), total ada 285 orang dikenakan pelanggaran Pasal UU ITE. Sedangkan sepanjang tahun 2020 (periode kedua Presiden Joko Widodo – Ma'ruf Amin), setidaknya ada 101 orang yang dikenakan pelanggaran Pasal UU ITE tersebut. Di antara daftar pelanggaran Pasal UU ITE sepanjang Pemerintahan Presiden Joko Widodo terdiri dari aktivis, jurnalis, akademisi, mahasiswa, dan masyarakat yang dibungkam, diintimidasi, dan dikriminalisasi saat menyampaikan pendapat secara damai (Amnesty Internasional Indonesia, 2021).



Sumber : <https://www.amnesty.id/kebebasan-berekspresi/> diakses tanggal 24 Januari 2022 jam 13 : 44

Gambar 1 Grafik Pelanggaran kebebasan berpendapat di Indonesia pada periode 1 & 2 Pemerintahan Joko Widodo

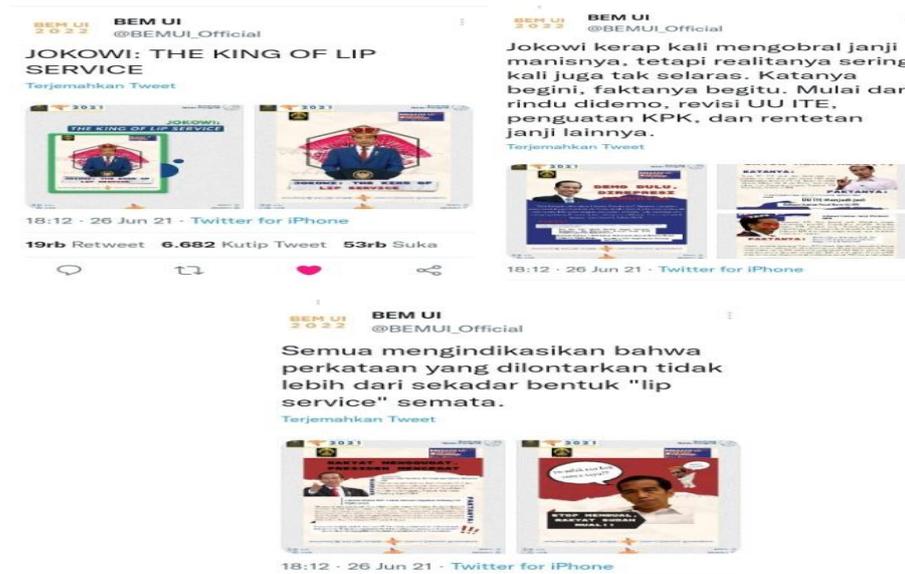
Pelanggaran pada Pasal UU ITE ini dapat kita lihat kembali pada contoh kasus yang begitu menonjol pada Agustus 2017. Seorang ibu rumah tangga yang bernama Sri

Rahayu divonis penjara selama satu tahun dan denda 20 juta rupiah. hal ini disebabkan beberapa unggahan media sosial facebook aku Sri Rahayu dianggap *Hoax*, berbau isu SARA (suku, agama, ras dan antar golongan) yang dapat menimbulkan permusuhan, dan unggahan yang menghina Presiden Joko Widodo (TribunNews.com, 2017).

Begitu juga yang terjadi terhadap Dandhy Dwi Laksono. Dandhy ditangkap polisi atas tuduhan melanggar Pasal 28 ayat (2), dan Pasal 45 A ayat (2) UU ITE, serta pasal 14 dan 15 KUHP pidana atas ujaran kebencian terkait unggahan di media sosial mengenai isu papua. Unggahan yang dipublikasikan Dandhy menampilkan beberapa foto Warga yang menjadi korban kekerasan oleh aparat di Wamena dan Jayapura (detik.news.com, 2019).

Di tengah-tengah ancaman Pasal Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), membuat orang-orang yang kritis memilih cara lain untuk mengkritik pemerintah agar tidak terjat Pelanggaran baik berbau penghinaan secara langsung, pencemaran nama baik, penyebaran hoax, dan lain-lain. Cara ini yaitu menggunakan cara majas / sindiran tanpa harus berkomentar secara langsung. Sindiran-sindiran dapat berupa halus maupun kasar baik dengan cara komedi ataupun lawak yang dapat menghibur bagi para pendengar dan pembacanya tanpa mengurangi nilai-nilai kritik yang disampaikan. Sehingga apa yang diutarakan dapat dimengerti dan diterima maksud serta tujuan yang disampaikan tersebut. salah satu yang digunakan dalam bermajas sindiran untuk mengkritik yaitu sarkasme. Sarkasme disampaikan berupa tulisan ataupun lisan yang mewakili perasaan dan pemikiran dari pengguna gaya bahasa tersebut. sarkasme sering digunakan oleh kalangan komedian, penyanyi dan kalangan sastrawan dalam karangan ataupun karya sastra mereka.

Salah satu sarkasme yang dapat kita lihat di media sosial twitter yang sempat viral yakni tweet pada akun @BEMUI_Official (26 Juni 2021 Pukul 18:12 WIB) yang dalam cuitannya "*JOKOWI : THE KING OF LIP SERVICE*", yang disertai foto Presiden Joko Widodo menggunakan mahkota merah layaknya seorang raja. Juga pada postingan berikutnya @BEMUI_Official (26 Juni 2021 Pukul 18:12 WIB) dalam cuitannya menyebutkan : "*Jokowi kerap kali mengoral janji manisnya, tetapi realitanya seringkali juga tak selaras. Katanya begini, faktanya begitu. Mulai dari rindu didemo, revisi UU ITE, penguatan KPK, dan rentetan janji lainnya.* Cuitan ini disertai foto berisi fakta janji jokowi yang disebutkan.



Sumber : Screenshot Pribadi di www.twitter.com di akses pada tanggal 24 Januari 2022 jam 14 : 22

Gambar 2 Sarkasme politik terhadap Presiden Joko Widodo

Akan tetapi mahasiswa yang berani menyuarakan pendapat dengan kritikan bernada sarkasme di atas berujung kepada pemanggilan, intervensi dan intimidasi terhadap mereka. Beberapa pejabat kampus keduanya menyayangkan dan mengintimidasi atas suara yang mereka lakukan. Dituduh sebagai kendaraan politik parpol atau oposisi, sehingga mereka diperintahkan untuk menghapus postingan-postingans sarkasme di tweet akun twitter mahasiswa (@BEMUI_Official dan @bemkmunnes) karena dianggap telah menghina Presiden dan Wakil Presiden sebagai simbol Negara.

Dan juga dalam al-qur'an telah dijelaskan pada surat al-hujurat ayat 11

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّن قَوْمٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِّسَاءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْألقَابِ بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَئِكَ هُم الظالمون

Artinya : *Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain (karena) boleh jadi mereka (yang diperolok-olokkan) lebih baik dari mereka (yang mengolok-olok) dan jangan pula perempuan-perempuan (mengolok-olokkan) perempuan lain (karena) boleh jadi perempuan (yang diperolok-olokkan) lebih baik dari perempuan (yang mengolok-olok). Janganlah kamu saling mencela satu sama lain dan janganlah saling memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Seburuk-buruk panggilan adalah (panggilan) yang buruk (fasik) setelah beriman. Dan barangsiapa tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim*

Berbicara tentang Sarkasme, Lestari (dalam Abdullah Faqih dkk. 2021:128) menyebutkan bahwa Sarkasme juga digunakan untuk menyindir, memiliki sifat yang lebih frontal dan menyakitkan dibandingkan gaya bahasa satire.

Maka dari itu, berdasarkan persoalan-persoalan penulis jabarkan di atas sangat tertarik untuk meneliti dan mendalami dalam bentuk skripsi yang berjudul “*Sarkasme Politik Terhadap Presiden Jokowi Periode 2019-2024 di Twitter dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*”.

METODE PENELITIAN

1. Metode Penelitian

Peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif (Creswell et al., 2007). Metode penelitian ini didasarkan pada filsafat postpositivisme yang digunakan untuk mengamati pada kondisi alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti sebagai instrumen kunci, pengambilan sumber data yang dilakukan secara *purposive* dan *snowbaal*. Teknik pengumpulan dengan triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif. Hasil dari penelitian kualitatif lebih menekankan *makna* dari pada *generalisasi*.

Menurut Bogdam dan Biklen (dalam Wayan Suwendra, 2018:3) menyebutkan bahwa : “ Pada penelitian kualitatif ada beberapa istilah yang dipakai yakni penelitian naturalistik atau alamiah, etnografi, intraksi simbolik, perspektif ke dalam, etnametodologi, fenomenologis, studi kasus, humanistik, ekologis, dan deskriptif.

2. Data dan Sumber Data

Pada tahap ini, peneliti menggunakan dua sumber data. Untuk lebih spesifik maka akan peneliti jelaskan sebagai berikut :

- a. Data primer merupakan data secara langsung yang diambil peneliti dari data pertama subjek penelitian. Data primer dalam penelitian ini berupa Postingan-postingan ataupun cuita-cuitan di media sosial Twitter. Postingan-Postingan dan cuitan cuitan yang diambil berupa tulisan dan video yang mengandung isi pesan Sarkasme Politik terhadap Presiden Joko Widodo Periode 2019-2024
- b. Data sekunder

Data sekunder data yang diperoleh melalui literatur atau buku-buku. Data sekunder yang diambil dalam penelitian ini berupa dokumen tertulis seperti buku,

jurnal, makalah, laporan penelitian dan dokumentasi yang berkaitan dengan pesan-pesan Sarkasme Politik terhadap Presiden Joko Widodo Periode 2019-2024 di Twitter dalam Perspektif Hak Asasi Manusia

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam tahap teknik pengumpulan data, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data berupa dokumen. Sesuai apa yang disebutkan oleh Prof. Dr. Supagiyono dalam bukunya yang berjudul “Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D” (2011:329) bahwa :

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan (life histories), ceritera, biografi, peraturan, kebijakan. Dokumen yang berbentuk gambar, misalnya foto, gambar hidup, sketsa dan lain-lain. Dokumen yang berbentuk karya misalnya karya seni, yang dapat berupa gambar, patung, film dan lain-lain.

Dalam pengumpulan data melalui metode dokumentasi, peneliti mengumpulkan data-data dari dokumen yang bersifat postingan-postingan dari sumber data di Media Sosial. Adapun Media sosial yang di jadikan sumber data adalah Twitter. Wujud dokumen yang diambil berupa tulisan-tulisan, meme dan video yang tersebar di media sosial yang berisi pesan Sarkasme Politik terhadap Presiden Joko Widodo di Twitter

Lokasi penelitian yang peneliti ambil yakni Media Sosial Twitter yang berisi Sarkasme Politik Terhadap Presiden Joko Widodo Periode 2019-2024 dimana sarkasme yang disampaikan merupakan wujud ataupun bentuk masyarakat indonesia dari berbagai kalangan meyalurkan hak asasi manusia mereka dalam kebebasan berekspresi di Indonesia sebagai negara demokrasi.

4. Teknik Analisa Data

Dalam teknik Analisa data, peneliti menggunakan analisis data kualitatif menurut Bogdan dan Biklen. Analisis data menurut Bogdan dan Biklen (dalam Albi Anggito dan Johan Setiawan, 2018:236) adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data serta memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat diolah. Mensistensiskannya, menemukan dan mencari polanya sehingga mendapatkan apa yang

penting dan dipelajari. Kemudian, menentukan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.

a. Pengumpulan data dalam penelitian ini diperoleh melalui dokumen dengan mengumpulkan postingan akun-akun media sosial twitter berupa foto, video dan tulisan tulisan yang menggunakan Sarkasme Politik terhadap Presiden Joko Widodo Periode 2019-2024. Hasil data yang diperoleh tersebut akan dicatat, dan dikumpulkan.

b. Reduksi data

Reduksi data merupakan suatu rangkaian proses yang dilakukan berupa memilih, merangkum hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting dengan dicari tema dan polanya dan menyingkirkan yang tidak perlu. Sehingga dengan cara mereduksi data dapat memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya jika diperlukan (Prof.Dr. Sugiyono, 2011:338).

Pada tahap ini peneliti akan menyaring dan memilih dan memilah data dari pengkelompokan yang besar menjadi pengkelompokan yang lebih kecil yang didapat dalam sumber data yaitu media sosial. Jika semua sudah dipilih dan dipilah maka data berupa postingan-postingan foto, video dan tulisan yang dapat diunduh ataupun discreenshoot akan disajikan sebagai informasi peneliti untuk dikembangkan lebih lanjut

c. Penyajian data

Menurut Miles dan Huberman (dalam Albi Anggito dan Johan Setiawan, 2018:248) mengatakan bahwa : “penyajian data adalah suatu rangkaian proses mengorganisasi informasi yang memungkinkan kesimpulan riset dapat dilakukan. Tahapan ini dilakukan untuk menemukan pola-pola yang bermakna serta memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan serta memberikan suatu tindakan.

Penyajian data yang peneliti saji berupa postingan berupa dokumen seperti tulisan, foto, video yang di ambil dari media sosial dan telah peneliti reduksi sebelumnya. Dokumen ini pastinya berupa dokumen Sarkasme Politik terhadap Presiden Joko Widodo Periode 2019-2024 di Twitter

d. Penarikan kesimpulan

Setelah peneliti mereduksi data, selanjutnya dilakukan penarikan kesimpulan yang merupakan proses untuk merangkum data-data yang telah direduksi atau telah

disajikan. Pada tahap ini yang dilakukan peneliti adalah menggambarkan makna dari data yang disajikan. Kesimpulan ini berisi Analisis dari permasalahan yang diteliti, sehingga tidak terjadi kesalahan dalam penyimpulan. Menyajikan analisis penggunaan Sarkasme Politik terhadap Pemerintahan Joko Widodo Periode 2019-2024 di Twitter dalam Perspektif Hak Asasi Manusia

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sebagaimana kita ketahui bahwa kebebasan berekspresi merupakan elemen terpenting dalam demokrasi. Bereksresi menjadi salah satu syarat yang memungkinkan berlangsungnya demokrasi dan partisipasi publik dalam setiap pembuatan kebijakan. Warga negara tidak dapat melaksanakan haknya secara efektif dalam berpartisipasi pada pembuatan setiap keputusan dan kebijakan publik apabila mereka tidak memiliki kebebasan untuk mendapatkan informasi dan mengeluarkan pendapatnya secara bebas.

Beberapa tokoh terkemuka salah satunya Jhon Locke menyatakan bahwa kebebasan berekspresi adalah cara untuk pencarian kebenaran. Kebebasan berekspresi ditempatkan sebagai bentuk kebebasan dalam mencari, menyebarluaskan dan menerima informasi serta kemudian memperbincangkannya apakah mendukung atau mengkritiknya sebagai sebuah proses untuk menghapus miskonsepsi kita atas fakta dan nilai (Alexander, 2005 : 128). Sedangkan menurut Jhon Stuart Mil Kebebasan berekspresi dibutuhkan untuk melindungi warga dari penguasa yang korup dan tiran (dalam Rahmanto, 2016 :48).

Seperti di Indonesia saat ini, dalam mengontrol pemerintahan Joko Widodo berbagai kalangan warga negara menggunakan bahasa-bahasa sarkasme sebagai ungkapan untuk mengkritik kebijakan-kebijakan publik yang dibuat. Tidak hanya itu, penggunaan bahasa sarkasme ditujukan atas ketidakpuasaan rakyat terhadap pemerintah Joko Widodo. Penggunaan bahasa-bahasa sarkasme ini disebarkan luas melalui media sosial sebagai wadah pertukaran informasi yang mudah dan cepat dilakukan. Hadirnya media sosial dan media elektronik menjadi platform mengalirnya informasi dan tentu menjadi wadah bagi warga negara untuk berpendapat dan berekspresi. Dalam konteks Negara Demokrasi, media mampu menjadi wadah penyampaian aspirasi publik. Media sosial memberikan dampak terhadap karakter baru, *audience generated* media memungkinkan publik untuk mendistribusikan konten yang mereka himpun sendiri (Straubhaar & Rose, dikutip oleh Latifah Nasution, 2020 : 44). Twitter merupakan salah satu media sosial yang sering dipakai *warganet* indonesia dalam bersarkasme sebagai

ungkapan ekspresi terhadap apa yang mereka rasakan dan pikirkan di era Pemerintah Joko Widodo. Berikut beberapa screenshot ungkapan-ungkapan yang bernada sarkasme terhadap presiden Joko Widodo di twitter.



Sumber : Screenshot Pribadi di www.twitter.com di akses pada tanggal 12 Desember 2022 jam 14 : 22

Gambar 2 Sarkasme politik terhadap Presiden Joko Widodo

Berdasarkan beberapa data sarkasme terhadap Presiden Joko Widodo Periode 2019-2014 di twitter yang peneliti uraikan, sarkasme tersebut merupakan bentuk salah satu Kebebasan Berekspresi yang dilakukan masyarakat terhadap apa yang mereka rasakan di saat Presiden Joko Widodo menjabat. Penggunaan bahasa sarkasme dengan ungkapan sindiran, celaan, cemoohan yang bernada kasar dan kurang enak didengar ditujukan sebagai upaya mengkontrol dan mengkritik Pemerintahan Presiden Joko Widodo. Namun kebebasan berekspresi ada batasan yang harus ditinjau dalam menyuarakan pendapat mereka agar tidak menimbulkan bahaya dan berbuat melanggar hukum. Menurut teori yang peneliti pakai, Joel Feinberg menyikapi bahwa Kebebasan berekspresi tidak sepenuhnya bebas akan tetapi ada batasan-batasan tertentu agar dapat menjaga kestabilan dan keamanan nasional.

Feinberg membagi batasan-batasan kebebasan berekspresi dengan ketat yaitu menggunakan prinsip bahaya (*harm principles*). Batasan-batasan kebebasan berekspresi tersebut dibagi feinberg dalam bentuk-bentuk ekspresi yaitu Penghinaan dan Kejahatan Kebenaran (Defamation and "Malicious Truth), Invasi Privasi (Invasions of Privacy), Ekspresi yang menyebabkan Kepanikan (Causing Panic) sehingga menyebabkan bahaya bagi orang lain (Feinberg, 1992 : 136).

Feinberg membagi pula ekspresi yang dapat menyebabkan bahaya bagi orang lain menjadi tiga yaitu ekspresi yang menyebabkan kepanikan (*Causing Panic*), memprovokasi untuk pembalasan kekerasan (Provoking Retaliatory Violence), menghasut untuk melakukan kejahatan atau pemberontakan (*Incitement to Crime or Insurrection*)(Feinberg, 1992 :128-144).

Jika merujuk dari teori Feinberg, maka tidak heran jika dalam kasus data ke dua tentang kritikan Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI), terkait Poster Presiden Joko Widodo yang dijuluki *King Of Lip Service* berujung kepada pemanggilan pihak Rektorat Universitas Indonesia yang dituding memberikan dampak negatif karena membawa pesan Provokasi (SindoNews.com, 2021). Hal demikian juga terjadi kepada Roy Suryo pada data ke sepuluh di atas, menjadi tersangka akibat unggahan tweet di akun twitternya yang dituding membawa pesan penghinaan serta melecehkan baik itu kepada Presiden Joko Widodo maupun kepada umat Budha. Ini dilihat dari gambar stupa yang sakral di edit dengan wajah Jokowi sehingga dapat melukai hati umat agama Budha (Liputan6.com, 2022).

Dikutip dari Elizabeth Camp (dalam Dinari 2015 : 497-503) Sarkasme memiliki tiga jenis yaitu :(1) *Propositional Sarcasm* merupakan jenis sarkasme yang memiliki bentuk yang jelas atau bentuk asli dari sarkasme itu sendiri; (2) *Lexical Sarcasm* merupakan jenis sarkasme yang diucapkan dengan awalan yang memuji, namun pada akhirnya berdampak negatif. *Lexical Sarcasm* lebih cenderung menggunakan ekspresi pada ujung ekstrem dari skala yang ditimbulkan. (3) *Illocutionary Sarcasm* merupakan tuturan yang mengekspresikan rasa iba, kekaguman dan keterkejutan. Illocutionary sarcasm adalah contoh makna inverse (kebalikan). Pembicara mengungkapkan idenya kebalikan dari yang diungkapkan dengan tulus. Dari ketiga jenis ini sarkasme ini, Lexical Sarcasm dan Illocutionary Sarcasm adalah bentuk sarkasme yang dirasa sedikit menjauhi dari batasan-batasan ekspresi menurut Feinberg serta dapat meminimalisir dari pelanggaran batasan kebebasan berekspresi menurut Undang-Undang di Indonesia.

Di Indonesia batasan terhadap kebebasan berekspresi terantun *pada Pasal 19 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Ratifikasi Kofenan Hak Sipil dan Politik*, menjelaskan bahwa Kebebasan berpendapat dan berekspresi itu dibatasi dan ada ada dua pembatasannya. Batasan untuk menghormati harkat dan martabat orang lain, di batasi dengan alasan melindungi keamanan nasional atau ketertiban umum atau kesehatan atau moral masyarakat.

Kedudukan keamanan nasional lebih tinggi daripada kepentingan publik. Akan tetapi, kedudukan berdasarkan keamanan nasional hanya bisa dibatasi pada skala yang benar-benar mengancam. Oleh karena nya manfaat sosial dari kebebasan berekspresi yang merugikan hak individu dapat dikesampingkan apabila hal tersebut mempengaruhi keamanan nasional seperti pendapat Feinberg berikut :

“Only the interest in national safety can outweigh the public interest in open discussion, but it sits on the scale only to the degree that is actually imperiled. From the point of view of the public interest alone, with no consideration whatever of individual rights, it would be folly to sacrifice the social benefits of free speech for the bare possibility that the public safety maybe somewhat affected” (Feinberg, 1992 :150-151).

Jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia maka maksud dari pendapat yang disampaikan Feinberg ialah “kedudukan keamanan nasional lebih tinggi daripada kepentingan publik. Akan tetapi batasan itu dilakukan apabila keadaan tersebut benar-benar menjadi ancaman bagi keamanan nasional. Maka dari itu manfaat sosial dari

kebebasan berbicara yang merupakan hak individu dapat dikesampingkan apabila hal tersebut mempengaruhi keamanan nasional”.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Penggunaan Sarkasme Politik Terhadap Pemerintahan Joko Widodo Periode 2019 – 2024 di Twitter. Maka kesimpulan yang dapat peneliti ambil adalah : Penggunaan Sarkasme terhadap Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) di twitter merupakan Ekspresi *warganet* atas respon ketidaksukaan kepada Jokowi berbagai kebijakan yang ia bangun. Memberikan berbagai julukan dengan dugaan telah berbohong dan hanya mengobral janji-janji manis dan tidak menepati janji politik tersebut.

Sarkasme merupakan ungkapan yang berisi kata-kata pedas menyindir bahkan dapat berupa Penghinaan dengan kata-kata mencela, mengejek, mengolok-ngolok dan mencemooh sehingga mampu menyakiti dan menyinggung orang yang disarkas tersebut. Menyikapi hal ini kebebasan berekspresi mempunyai batasan-batasan yang menurut Feinberg dibagi batasan-batasan kebebasan berekspresi dengan menggunakan prinsip bahaya (*harm principles*). Batasan-batasan kebebasan berekspresi tersebut dibagi feinberg dalam bentuk-bentuk ekspresi yaitu Penghinaan dan Kejahatan Kebenaran (Defamation and “Malicious Truth), Invasi Privasi (Invasions of Privacy), Ekspresi yang menyebabkan Kepanikan (Causing Panic) sehingga menyebabkan bahaya bagi orang lain.

DAFTAR PUSTAKA

- Alexander, Larry. (2005). *Is There A Right to Freedom of Expression*. New York: Cambridge University Press
- Amnesty Internasional Iimonesia. (2021). *Kebebasan Berekspresi*. <https://www.amnesty.id/kebebasan-berekspresi/>.
- Anisyah, S. (2022). Women Pregnancy amidst Covid-19: Understanding Vulnerability, Developing Vaccine Strategy, and Capacity in Palembang. *Jurnal Studi Sosial Dan Politik*, 6(2), 205–216. <https://doi.org/https://doi.org/10.19109/jssp.v6i2.13350>
- Anggito, Albi & Johan Setiawan.(2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Sukabumi : CV Jejak
- Asri, Muhammad. (2018). *Hak Asasi Manusia : Filosofi, Teori & Instrumen Dasar*. Cetakan pertama. Makassar : CV Sosial Politic Genius (SIGn)
- Ardiyansyah, A., & Maielayuska, M. (2022). Political Communication Instruments Fasha Maulana in Influencing Millennial Voter: Evidence from Jambi Mayoral Election in 2019. *Jurnal Studi Sosial Dan Politik*, 6(2), 232–244. <https://doi.org/https://doi.org/10.19109/jssp.v6i2.13614>
- Baidlowi, I. A., & Pradana, H. A. (2022). Indonesia’s Identity and Norms in Response to

- the Nagorno-Karabakh Conflict in 2020: A Constructivism View. *Jurnal Studi Sosial Dan Politik*, 6(2), 191–204. <https://doi.org/https://doi.org/10.19109/jssp.v6i2.13027>
- Budianto, K. (2019). Gaya Kepemimpinan Kepala Kantor Wilayah Agama Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Dalam Meningkatkan Kualitas Kinerja Pegawai. *Nurani: Jurnal Kajian Syari'ah Dan Masyarakat*, 223–233. <http://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/Nurani/article/view/4677%0Ahttp://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/Nurani/article/download/4677/2701>
- Budiarjo, Mirriam. (2015). *Dasar-Dasar Ilmu Politik. Edisi Revisi Cetakan Ketiga*. Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama
- Creswell, J. W., Hanson, W. E., Clark Plano, V. L., & Morales, A. (2007). Qualitative Research Designs: Selection and Implementation. *The Counseling Psychologist*, 35(2), 236–264. <https://doi.org/10.1177/0011000006287390>
- Dinari, Irene. (2015). *Jenis-Jenis dan Penanda Majas Sarkasme dalam Novel The Return of Sherlock Holmes*. Seminar Nasional PRASASTI II “Kajian Pragmatik dalam Berbagai Bidang
- Fadli, A. M. D., Abdoellah, O. S., Widanarto, A., & Muradi, M. (2022). Power Relation and Cooperation between Actors: Issue of Nickel Mining Business Licenses in Konawe Regency. *Jurnal Studi Sosial Dan Politik*, 6(2), 150–162. <https://doi.org/https://doi.org/10.19109/jssp.v6i2.13692>
- Faqih, Abdullah. dkk (2021). *Merayakan Keberagaman Berbahasa Kompilasi Esai Terbaik Surabaya Language Festival 2020*. Surabaya : PT Lontar Digital Asia
- Feinberg, Joel. (1992). *Freedom and Fulfillment*. Princeton : Princeton University Press.
- Harahap, Raegen., Zalpa, Y., & Yumitro, G. (2021). Islam and Populism: Palembang (Indonesia) Mayor Election in 2018. *The Indian Journal of Politics*, 55(2), 1–15.
- Harahap, R., & Anisyah, S. (2021). Re-Interpretasi Utopisme “Palembang Emas Darussalam” melalui Penyediaan Ruang Terbuka Hijau di Kota Palembang. *Jdp (Jurnal Dinamika Pemerintahan)*, 4(1), 16–27. <https://doi.org/10.36341/jdp.v4i1.1700>
- Harahap, R., Hati, P. C., & Abdussalam, K. (2021). Konvergensi Sebagai Sarana Bertahan Media Massa: Case Study Tribun Sumsel. *Ampera: A Research Journal on Politics and Islamic Civilization*, 2(2), 118–132. <https://doi.org/10.19109/ampera.v2i2.8428>
- Hidayati, H., Sutikno, A. N., & Erawanto, S. (2022). The Pivotal Issues of Human Rights: A Literature Review by Eight World Researchers. *Jurnal Studi Sosi*, 6(2), 30–37. <https://doi.org/https://doi.org/10.19109/jssp.v6i1.10198>
- Hidayaturrahman, M., Hamhij, N. A., Sugiantiningsih, A. A. P., Ubaid, A. H., & Elazhari, E. (2022). Political Broker Giving Money and Intimidating in Regional Head Elections in Indonesia. *Jurnal Studi Sosial Dan Politik*, 6(2), 177–190. <https://doi.org/https://doi.org/10.19109/jssp.v6i2.10102>
- Liputan6.com. (2022). Jadi Tersangka dan Ditahan, Roy Suryo Terancam Hukuman 6 Tahun Penjara. Retrieved on August 25, 2022. <https://www.liputan6.com/news/read/5034872/jadi-tersangka-dan-ditahan-roy-suryo-terancam-hukuman-6-tahun-penjara>
- Marthen, T., Raegen, H., & Yulion, Z. (2022). Distance Learning during COVID-19 in South Sumatera: Challenges and Government Strategy. *Proceeding for the International Conference on Social Studies and Humanities*.
- Mayori, H. (2021). PALEMBANG EMAS DARUSSALAM: RESURGENCE MALAY

- CONSCIOUSNESS THROUGH PUBLIC POLICY IMPLEMENTATION. *The 7th International Seminar on Social, Humanities, and Malay Islamic Civilization*, 47–66.
- Nabilah, R., Izomiddin, I., & Harahap, R. (2022). Fenomena Rekrutmen Artis Anggota Legislatif Ditinjau dari Perspektif Teori Partai Politik. *Jurnal Prodi Ilmu Politik*, 1(2), 81–92. <https://doi.org/https://doi.org/10.19109/jsipol.v1i2.13710>
- Newsdetik.com. (2021). Ini Cuitan Soal Papua yang Bikin Dandhy Laksono Jadi Tersangka. Retrieved on December 25, 2021. <https://news.detik.com/berita/d-4723837/ini-cuitan-soal-papua-yang-bikin-dandhy-laksono-jadi-tersangka>
- Rahmanto, Toni Yuri. (2016). *Kebebasan Berekspresi Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia: Perlindungan, Permasalahan dan Implementasinya Di Provinsi Jawa Barat*. Jurnal Hak Asasi Manusia Volume 7 No 1
- Saraswati, Yana Dwifa, Najamuddin Khairur Rijal, and S. M. D. (2022). #MeToo Movement: Global Civil Society in Fighting Sexual Harassment in South Korea. *Jurnal Studi Sosial Dan Politik*, 6(2), 163–176. <https://doi.org/https://doi.org/10.19109/jssp.v6i2.11936>
- SindoNews.com. (2021). Kronologi Bem UIN Dipanggil Pihak Rektorat, Usai Kritik Jokowi. Retrieved on August 24, 2021. <https://nasional.sindonews.com/read/468178/12/kronologi-bem-ui-dipanggil-pihak-rektorat-usai-kritik-jokowi-1624849560>
- Sholihin, E. B., Harahap, R., & Zalpa, Y. (2022). DOES THE PANDEMIC DECLINE OR MAINTAIN DEMOCRACY? TWO SIDES EFFECTS OF PANDEMIC ON. *The Sunan Ampel Review of Political and Social Sciences*, 01(02), 16–39.
- Singgalen, Y. A., Sijabat, R., Widyastuti, P., & Harnadi, A. (2022). Community Empowerment and Social Welfare Development through Social Entrepreneurship. *Jurnal Studi Sosial Dan Politik*, 6(2), 217–231. <https://doi.org/https://doi.org/10.19109/jssp.v6i2.13302>
- Sugiyono. (2011). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung : Alfabeta
- Suwendra, Wayan. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif dalam Ilmu Sosial, Pendidikan, Kebudayaan, dan Keagamaan*. Badung : CV Nilacakra
- Tribunnews 2022. Diduga Menyebarkan Ujaran Kebencian, Sri Rahayu Ditangkap Bareskrim Polri. Retrieved on Auguts 24, 2021. <https://www.tribunnews.com/metropolitan/2017/08/06/diduga-menyebarkan-ujaran-kebencian-sri-rahayu-ditangkap-bareskrim-polri>
- Waty, R. R., Mirza, I. M., & Fadli, N. M. (2022). Separatism Movement and Contemporary Reconciliation: Causes and its Impact towards Political Development in Papua Reni. *Jurnal Studi Sosi*, 6(2), 134–149. <https://doi.org/https://doi.org/10.19109/jssp.v6i2.11953>